



KR-Mc Thoriq

**KPPBC Kudus memusnahkan rokok ilegal, dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman Kantor Bea dan Cukai Kudus.**

SENILAI RP 8,13 MILIAR

## 13,2 Ton Rokok Ilegal Dimusnahkan

**KUDUS (KR)** - Sebanyak 13,2 ton rokok ilegal senilai Rp 8,13 miliar dimusnahkan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kudus.

Rokok bodong yang dimusnahkan terdiri dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 7,92 juta batang dan 850 batang Sigaret Kretek Tangan (SKT). Serta barang bukti lain, yaitu 10.900 keping pita cukai palsu, tiga karung etiket, dua karung plastik OPP, 12 unit alat pemanas, lima rol kertas pembungkus filter rokok atau cigarette tipping paper (CTP) dan 33 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pemusnahan barang bukti yang telah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan itu dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman Kantor Bea dan Cukai Kudus, Selasa (26/7). Selanjutnya sisa rokok ilegal hasil penindakan periode Oktober 2021 hingga Maret 2022 itu diangkut 13 truk, kemudian ditimbulk di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati. Hadir menyaksikan pemusnahan rokok ilegal, Forkompimda Kudus, serta Kajari se-eks

wilayah Karesidenan Pati. Kepala KPPBC TMC Kudus Moch Arif Setiyo Noegroho mengatakan, rokok ilegal dan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama enam bulan mulai Oktober 2021 hingga Maret 2022. Pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tahun 2020 dan 2021. Yakni sebanyak 2,9 juta batang rokok ilegal dari 10 orang tersangka. Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 8,13 miliar dengan potensi penerimaan negara yang hilang sebesar Rp 5,35 miliar. Jumlah itu dihitung berdasar nilai cukai, PPN Hasil Tembakau, dan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar. "Barang yang kami musnahkan sebagian besar merupakan rokok tanpa pita cukai dan sisanya dilekati pita cukai palsu," terangnya. Untuk mengempur peredaran rokok ilegal, pihaknya akan terus melakukan operasi, baik secara mandiri maupun bersinergi dengan Peme-

rintah Daerah dan aparat penegak hukum lainnya. "Peredaran rokok ilegal harus kita tekan, karena telah menggerogoti peredaran rokok legal yang telah memberikan kontribusi penerimaan kas negara dari sektor cukai. Kami tak akan membiarkan rokok ilegal berkembang," tegasnya. Untuk menekan peredaran rokok ilegal dapat ditempuh melalui cara preventif dan represif. Dari sisi preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi, memasang baliho, iklan di radio dan media cetak. Sedang kegiatan represif dilakukan dengan menggelar operasi. Antara lain, pihaknya telah menggelar Operasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2022 secara serentak pada 17 Mei-18 Juni 2022. Dalam operasi itu, Bea Cukai Kudus berhasil menggagalkan berbagai modus pelanggaran di bidang cukai, seperti penjualan rokok ilegal melalui e-commerce atau online shop, pendistribusian melalui jasa ekspedisi, termasuk berbagai cara konvensional berupa pengiriman menggunakan kendaraan maupun penggerebekan tempat-tempat produksi dan gudang penyimpanan rokok ilegal. Seluruh barang bukti pelanggaran beserta pelakunya telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (Trq)-f

## Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Islamophobia

**YOGYA (KR)** - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah menear narasi Islamophobia. Di era sekarang tidak ada Islamophobia di Indonesia. Istilah tersebut hadir karena tuduhan antarrakyat, bukan karena pemerintah. "Saya katakan enggak ada islamophobia di Indonesia. Enggak ada. Orang Islam sudah bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual. Pokoknya semua orang Islam sudah bebas," tandas Mahfud MD ketika menjadi pembicara kunci dialog kebangsaan 'Imaji Satu Abad Indonesia' di Auditorium Prof KH Abdulkahar Mudzakkir UII Jl Kaliurang, Selasa (26/7). Dialog dibuka Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD dengan sederet pertanyaan di antaranya : apakah semua



Yahya Staquf

Mahfud MD

anak bangsa sudah dapat menjalankan ajaran agama dengan aman dan nyaman termasuk minoritas? Apakah semua anak bangsa sadar dan mengupayakan dengan serius untuk menjaga persatuan Indonesia? Atau sebaliknya, kepentingan sesaat dan kadangkala seksat menjadikan keterbelahan semakin menganga? Dan masih banyak lainnya. Narasumber dialog adalah Ketua Umum PBNU KH

Yahya Cholil Staquf dan Rektor UIN Sunan Kalijaga 2010-2014 Prof Dr Musa Asy'arie. "Yang mengatakan islamophobia itu Abu Janda, bukan pemerintah. Mungkin ada oknum tertentu yang islamophobia, tetapi oknum yang lain tidak. Pemerintah tidak pernah menuding pihak tertentu, termasuk setiap kebijakan negara yang dibuat," tandasnya. (Fsy)-d

## JELANG PENETAPAN GUBERNUR DAN WAGUB DIY

### Pansus Susun Berita Acara Berkas Verifikasi

**YOGYA (KR)** - Panitia Khusus (Pansus) BA 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah menyelesaikan tahap verifikasi tentang berkas persyaratan dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Bertempat di Ruang Lobby Gedung DPRD DIY, pansus langsung membuat berita acara penetapan, Selasa (26/7). Wakil Ketua Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur 2022-2027, Huda Tri Yudianta mengatakan, sebelumnya pansus menerima berkas persyaratan pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2022-2027 dan langsung melakukan verifikasi. Rapat kerja dihadiri GKR Condokirono dan GKR Bendara dari pihak Kasultanan. Sementara pihak Puro Pakualaman diwakili oleh KPH Indrokusumo. Baik pihak Kraton maupun Puro menyepakati apa yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut. "Proses verifikasi sudah berlangsung sejak tanggal 19 Juli kemarin. Dan hari ini berkas kami sampaikan melalui berita acara pansus. Berkas pentapan dinyatakan semua sah," kata Huda. Sesuai jadwal, berita acara akan langsung

disampaikan kepada pimpinan DPRD DIY pada 29 Juli mendatang. Selanjutnya akan dilangsungkan penyampaian visi misi Gubernur pada 8 Agustus. Sehari setelahnya agenda tanggapan fraksi-fraksi. "Dilanjutkan penetapan melalui rapat paripurna DPRD DIY," tambahya. Hasil dari rapat paripurna tersebut, tim akan langsung menyerahkan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Diharapkan sesuai tatakala akan dilakukan pelantikan pada 10 Oktober. Sementara itu GKR Condokirono mengatakan, tim internal kraton telah melakukan pembahasan tentang visi misi yang akan disampaikan Sultan dalam memimpin DIY 2022-2027. Visi misi tersebut dipastikan akan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Beberapa (visi misi) sudah ada yang selesai. Jadi *Ngarso Dalem* tinggal menyempatkan. Kita ikuti aturannya saja," ujarnya. Disinggung apakah ada persiapan khusus, diungkapkan GKR Bendara tidak ada. "Yang penting semuanya sehat saja," ungkapnya. (Awh/Bro)-f

**Ketum PBNU** Sedang Ketum PBNU Yahya Staquf mengajak, untuk berbicara masa dalam konteks realitas hari ini, sangat penting memegang titik tolak. Mengingat ke depan banyak variabel yang mungkin tidak dikira, sebab banyak perubahan yang tidak dikira. Untuk Indonesia, titik tolaknya adalah berdiri dengan falsafah universal : bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saat ini, ujar Yahya, selain macam-macam ancaman bagaimana teknologi membawa dampak, juga terdapat satu ancaman yang sangat berbahaya, yakni potensi konflik. Apalagi, kita hidup dalam keberagaman. (Fsy)-d

## Gelombang Setinggi 6 Meter Berpotensi Terjadi di Pesisir Jawa

**JAKARTA (KR)** - Gelombang sangat tinggi air laut yang berkisar 4-6 meter berpotensi terjadi di Pesisir Selatan Pulau Jawa bagian tengah, Barat dan Timur pada Selasa (26/7) hingga Rabu (27/7). Informasi peringatan dini ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagaimana dikemukakan Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyoo di Jakarta, Selasa (26/7). Dijelaskan, wilayah perairan yang berpotensi terjadi gelombang tinggi itu meliputi Perairan Pesisir Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta. Kondisi yang sama juga berlaku di Samudera Hindia Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta. Gelombang sangat tinggi air laut itu memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran yang meliputi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal Ferry dan kapal ukuran besar seperti kargo atau pesiar. Eko Prasetyoo mengatakan, gelombang

sangat tinggi itu dipicu oleh adanya fenomena fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin yang konsisten hingga 46 kilometer perjam di Pesisir Selatan Jawa. "Fenomena fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin yang konsisten hingga 46 km/jam di Pesisir Selatan Jawa mengakibatkan gelombang tinggi mencapai 4-6 meter," ungkap Eko. Menurut Eko, ketinggian banjir pesisir bisa berbeda di setiap wilayah. Namun, kondisi tersebut secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir dan aktivitas tambak garam serta perikanan darat. Sebagaimana yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga meminta agar pemangku kebijakan di tiap-tiap daerah yang lain agar rutin memberikan pendampingan dan sosialisasi peringatan dini kepada masyarakat. (Ati)-d

## Mardani H Maming Masuk DPO

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan tersangka Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO). Pasalnya, mantan Bupati Tanah Bumbu yang terjerat kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu, dua kali tidak menghadiri panggilan tim penyidik KPK, sehingga dinilai tidak kooperatif. "Untuk itu, hari ini (Selasa) KPK memasukkan tersangka dalam DPO dan paralel dengan itu, KPK juga berkeinginan surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (26/7). Sehubungan hal itu, KPK mengharapkan Maming kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tidak pidana korupsi tidak terkendala. Selain itu, ujar Ali Fikri, KPK juga meminta masyarakat jika memiliki informasi keberadaan Maming dapat menghubungi KPK melalui pusat panggilan 198 atau kantor polisi terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. "Dalam hal ini peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian

perkara ini sangat dibutuhkan, karena kita berharap penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien," tutur Ali Fikri. KPK sebelumnya melakukan upaya penjemputan paksa di salah satu apartemen di Jakarta, Senin (25/7). Namun, upaya itu belum berhasil menemukan yang bersangkutan. Denny Indrayana seusa sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada wartawan mengaku sudah beberapa hari tidak berkomunikasi dengan Mardani H Maming. Selain itu, ia mengatakan tidak mengetahui keberadaannya. Denny pada kesempatan itu meminta KPK untuk bersabar sampai putusan sidang praperadilan. Tim kuasa hukum Maming telah mengirim surat ke KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan lantaran sidang praperadilan yang diajukan Maming masih berproses. Sementara dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, KPK menyerahkan surat lampiran yang menetapkan tersangka mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO). (Ful)-d

## PEMDA DIY TERUS DORONG PEMULIHAN EKONOMI Pengurangan Kemiskinan Masih Jadi 'PR'

**YOGYA (KR)** - Sejumlah upaya untuk memulihkan ekonomi dan mempercepat penanganan kemiskinan terus dilakukan Pemda DIY. Apalagi jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, angka kemiskinan DIY per Maret 2022 turun menjadi 11,34 persen dibanding September 2021 yang sebesar 11,91 persen. Meski turun, angka kemiskinan ini masih belum dapat memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memenuhi target rerata nasional. "Karena itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mendorong DIY untuk segera mengimplementasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan. Terutama dalam upayanya menyelesaikan 'PR' soal pengurangan kemiskinan," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rakordal Triwulan II-2022 di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (26/7). Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal Bangda) ini mengangkat tema 'Intervensi Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Pendukung Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

di DIY. Sultan juga memberikan apresiasi bagi OPD yang telah berhasil memperoleh predikat baik dan sangat baik pada hasil Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi. Apresiasi diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai Pengguna Anggaran Tertinggi dengan predikat Baik. Sementara, Pengguna Anggaran Terendah Disdikpora DIY dengan predikat Cukup. Apresiasi juga diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tertinggi dengan predikat Sangat Baik. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran Terendah Museum Negeri Sonobudoyo dengan predikat Baik. Menurut Sultan, lima program prioritas pembangunan DIY pada tahun 2022 antara lain pemberdayaan sumber daya manusia berkualitas dengan indikatornya, SDM yang sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi. Peningkatan infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial guna mewujudkan pembangunan yang merata. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Ria)-f

## POLISI GEREBEK JUDI SABUNG AYAM 35 Pejudi Digiring ke Polres Bantul



KR-Judiman

**Pelaku judi sabung ayam dan peralatannya diamankan di Mapolres Bantul.** Setelah dilakukan pemeriksaan, dari 35 orang itu 6 orang dinyatakan sebagai tersangka. Mereka KB, AA, AS, SN, KS dan SR. Mereka bertindak sebagai bandar dan penyelenggara. Menurut Wakapolres Bantul Kumpul Sancoko Punjung Seksono SIK SH

bung ayam, petugas juga mengamankan barang bukti berbagai barang peralatan sabung ayam, seperti ayam jago aduan, pagar arena sabung, 30 sepeda motor, dadu cliwik, uang taruhan Rp 2,3 juta dan lain-lain. Bagi tersangka bandar dan penyelenggara sabung ayam tersebut dijerat sesuai pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Wakapolres Bantul mengimbau kepada warga Bantul jika mengetahui ada arena perjudian, seperti sabung ayam dan sejenisnya agar langsung melapor ke Polres Bantul untuk dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku. "Termasuk jika ada *backingnya* laporkan ke kami," tegasnya. (Jdm)-f